



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR: 487.22/533/2018

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dirujuk oleh setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Juli 2018

BURATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 487.22/343/2018
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	KOTER INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KORSEBUEKSI	
				APABILA DIBUKA	MANPAAT APABILA DITUTUP
	UMUM				
1	Surat Rahasia	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas, kecuali atas urusan Kodeksi Informasi/pengadilan	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan
2	Penetapan Keputusan Bupati yang bersifat rahasia	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan
3	Telaah Staf untuk saran/sajian draf kebijakan Bupati	- Pasal 5 ayat (2), Huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat menimbulkan berbagai spekulasi dan kegaduhuan yang tidak perlu padahal masalah/draft masih dalam proses/pembahasan	Kelancaran proses dan tahapan penyusunan kebijakan
4	Memorandum/surat-surat antar dua inter badan publik	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
5	Perjanjian kerjasama daerah	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Setelah perjanjian kerjasama disepakati dan ditandatangani	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
6	Disposisi surat pimpinan	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Selama belum ada tindak lanjut dari CPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
7	Rencana pelaksanaan tukar mentikar/pertukaran dengan barang daerah	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf e dan i	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum

8	Proses dan hasil penyusunan RKPD kabupaten di kecamatan	<p>- Permendagri No. 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j</p>	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor (BPSP/BPK)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
9	Proses dan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	<p>- Permendagri No. 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j</p>	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor (BPSP/BPK)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan

10	Tata letak perencanaan pembangunan dari pelak-pelakan DPRD untuk RKPD	- Permenologi No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengumumkan proses penyusunan kebijakan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan
11	Proses musyawarah RKPD Kabupaten	- Permenologi No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparat/ur pemrakas/ pengawasan/ auditor (BPKP/BPK)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyabangan dan pihak yang tidak berkepentingan

12	<p>Hasil monev/evaluasi RKPD Kabupaten</p>	<p>- Permenandagri No. 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j</p>	<p>sampai dengan ditetapkan produk hukum Perkada RKPD</p>	<p>Mengganggu proses penyusunan ketajukan</p>	<p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan</p>
13	<p>Proses dan hasil tahapan pembahasan NUA PPKAS</p>	<p>- Permenandagri No. 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j</p>	<p>Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya/pemeriksa/pengawasan/auditor (DPKP/BPK)</p>	<p>Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</p>	<p>Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p>
14	<p>Ple data spasial rencana tata ruang untuk pola ruang, struktur ruang dan/atau kawasan strategis</p>	<p>- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - UU No. 4 Tahun 2011 Informasi Geospasial - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j</p>	<p>Tidak terbatas</p>	<p>Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</p>	<p>Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p>

15	Proses tahapan penyusunan rencana tata ruang	- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Ruang - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	sampai dengan ditetapkannya pedes hukum rencana tata ruang	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan dengan tetap mengacu ketentuan perundangku
16	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/ appraisal untuk pengadaan tanah	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf e dan i	Setelah proses selesai	Berpotensi keseribean pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum
17	Dokumen karya intelektual oleh Lembaga/swasta/ kelompok/perorangan	- UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b dan j	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat, berpotensi pelanggaran hukum/perbuatan	Menjalin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat, menjamin pemilikanya memperoleh manfaat ekonomi
18	Kapan pemerintah pusat dan Berita Acara Pelepasan tanah kas desa	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf e dan i	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum
19	Kapan teknis penetapan lokasi dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum/ non kepentingan umum	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf e dan i	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum
PEMERINTARAN					
20	Surat pengaduan masyarakat	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

21	Keputusan alat-alat kelengkapan DPRD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota - Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf (dan) 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
22	Proses pengamalan, pengesahan pemberitahuan dan pengungkapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang - Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf (dan) 	Tidak terbatas	Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak saat asas)	Sesuai dengan prosedur yang sebenarnya berjalan (saat asas)

23	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di pengadilan	- UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, Pasal 70 ayat (2) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, i dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan, (2) Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
24	Soal ujian tertulis perangkat desa dan ujian tertulis bakal calon Kepala Desa	- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j - Juklak, Jukris	Tidak terbatas	(1) Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak dan/atau tidak boleh diungkap
25	Proses pengamalan pengesahan pemberhentian Kepala Desa	- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak dan/atau tidak boleh diungkap
26	Identitas terungkap dan korban kasus narkoba untuk kegiatan penyelidikan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, h dan i	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan, (2) Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

27	Rancangan keputusan bupati pada saat proses bimbingan di bagian hukum	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf (dan)	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak dan/atau tidak boleh diungkap
28	Dokumen dan Informasi perkara yang sedang diangani oleh PNS -	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan)	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
29	Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	- UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan)	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
30	Informasi data pribadi penegak pda	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
31	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan)	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

32	Dokumen Kependudukan yang meliputi : 1. Biodata penduduk 2. KK 3. KTP 4. Surat Keterangan Kependudukan 5. Akta Pencatatan Sipil 6. Akta kelahiran, kematian, perkawinan, pernikahan dan akta pengalihan anak	- UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan 84 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j	Tidak terbatas, kecuali atas jin yang bersangkutan	- Bertentangan dengan Triak pribadi/privasi yang berstatus disalahgunakan - Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	- Melindungi peryalihgunaan data/informasi - Menjaga privasi strating yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi
33	Penunjukan prugas pembuatan naskah sjen dan dokumen naskah sjen pemugkai desa	- Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf l dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
POLITIK					
34	Asip daftar orang yang masuk O30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Keaspian Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Mengungkap rahasia pribadi dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi data pribadi dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

35	Proses Usulan Keputusan Gubernur tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/ Pimpinan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota - Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf I 	Tidak terbitas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
36	Proses Usulan Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota - Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf I 	Tidak terbitas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

37	Data kegiatan intelektual terkait dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganannya yang mengganggu masyarakat	- UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c, i dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/ wilayah (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/ wilayah dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM					
38	Peta Lokasi Penyelamatan Anasir	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Keamanan Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
39	Identitas korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu (PPJAKB) Provinsi Jorong	- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10 huruf c - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
40	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	- Kep Mahkamah No.1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang PPNS di lingkungan Pemda - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, i dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengganggu proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memper lancar proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

41	Rencana penertiban/ perindakan dan pengalihan pada objek tertentu	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, i dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
42	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pidana	- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, i dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
KESAJAHTERAAN RAKYAT					
43	Naskah soal UN/UNBK/ UNPK/UASBM, dll	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j - Permendikbud, Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional	Tidak terbatas, kecuali untuk ujian berbasis kertas dan tidak ada perintah pembatasan/ pembatasan	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
44	Proses scanning/scoring UN/ UNBK/UNPK/UASBM	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j - Permendikbud, Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

45	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
46	Laporan kasus/diagnosa penyakit pasien	- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
47	Rahasia kedokteran yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- Permenkes No. 1419/KENKES/ PER/X/2005 pasal 18 ayat (1) - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
48	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- Kemenkes No.496/Menkes/SK/ IV/2005 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
49	Proses penentuan jura lama terkait dengan pemberdayaan masyarakat	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i	Sampai dengan pengumuman jura lama	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
50	Proses penentuan penerima bantuan kepala pemerintah desa, kecamatan dan kelompok masyarakat	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i	Sampai ada penetapan	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
51	Hasil diagnosa/bedah kasus (penyandang HIV/AIDS dan tika WTS)	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

52	Identitas korban tindak kekerasan	- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10 huruf c - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h	Tidak terbatas, kecuali atas ijin yang bersangkutan	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
53	Data riwayat pasien kepada Rumah Sakit	- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j	Tidak terbatas, kecuali atas ijin yang bersangkutan	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
54	Data Penderita HIV/AIDS	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j	Tidak terbatas, kecuali atas ijin yang bersangkutan	Potensi menimbulkan kerawanan/kekawatiran masyarakat	sebagai analisis kebijakan daerah
PEKERJAAN					
55	Surat Perijinan/ijin usaha beserta dokumennya	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b dan j	Tidak terbatas, sampai dilakukannya ijin usaha, selama ijin masih dipergunakan	Mengungkapkan data pribadi pemegang ijin	Menjaga privasi dari pemegang ijin
56	Data kekayaan alam	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf d dan j	Tidak terbatas, kecuali mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah	Dapat mengungkap informasi kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam
57	Kajian pemerintah pusat dan Berita Acara Pelepasan tanah aset pemerintah daerah	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Sampai proses selesai	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud merugikan keuntungan	Lebih mengutamakan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
58	Berita sandi	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 5	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
59	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 5	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
60	Pemangkat khusus persandian	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 5	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

61	Kunci sistem sandi	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 5	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
62	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 5	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
63	Jalur komunikasi VIP	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
64	Frekuensi radio komunikasi pribadi	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
65	Berita/Radiogram rahasia	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
66	Data teknis potensi air tanah	- PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Pasal 23 ayat (3) - Pasal 17 (U) No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf d, j	Selama proses air tanah dipertahankan masih ada	Dapat mengungkap kekayaan alam	Mempercepat pengurusan dan pengelolaan SDA
67	Surat pengajuan Hak Merek, Cipta, Paten dan Desain yang masih dalam proses Kementerian	- UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten - UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek - UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf b	Sampai selesai proses pengajuan	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
68	Lokasi server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

69	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Selama masih digunakan/bersisa	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
70	Bandwidth Management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Selama masih digunakan/bersisa	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
71	Sistem Keamanan Informasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Selama masih difungsikan/digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
72	Kode Akses Elektronik dan user akses/password	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Selama masih digunakan/bersisa	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
73	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Selama masih digunakan/bersisa	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
74	Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial	- Pasal 6 ayat (3) Huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b	Tidak terbatas, kecuali ada ijin dari pribadi yang bersangkutan	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional
75	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Tidak terbatas, kecuali atas ijin para pihak dan pihak yang berwenang	Sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan

76	Rencana Harga Perkiraan Sendiri (RHS)	- Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Refraksi Dagang - Pasal 6 ayat 3 Huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b,j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa
77	Dokumen penawaran kontrak	- Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 6 ayat 3 Huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Huruf b,j)	Tidak terbatas, kecuali atas ijin para pihak dan pihak yang berwenang	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran
78	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b,j	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga yang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan menjaga integritas yang sebat melindungi kerahasiaan dokumen
79	Proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan peredaran papak dan peredaran pestisida	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a,b,i dan j	Sampai selesai proses penyelidikan dan penyidikan	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan
80	Proses penetapan pencairan bantuan sosial, bantuan pemerintahan, hibah dan kemasyarakatan	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i	Sampai penetapan penerima bantuan	Berpotensi menimbulkan kerawanan dan persaingan di dalam masyarakat	Memuluskan perencanaan program yang dibuat oleh pemerintah
PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAAN					
81	Bi-data individu dan data keluarga : a.ketenagakerjaan b.transmigrasi	- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU No. 29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i	alat ijin para pihak bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

82	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf e	Sampai dengan ditetapkannya Keputusan oleh Gubernur	(1) Dapat mengungkap proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
83	Usulan penetapan Upah Minimum Bupati kepada Gubernur	- PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan - Permenakertraps No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf e	Sampai dengan diartapkannya Upah Minimum oleh Gubernur	(1) Dapat mengungkap proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
84	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, l dan j	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
85	Proses penyusunan pertimbangan teknis kesesuaian status lahan	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, e dan i	Sampai dengan ditetapkannya pertimbangan teknis	Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi penyalahgunaan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
PENGAWASAN					
86	Hasil audit terkait dengan medical error	- Kemenkes No.496/Menkes/SK/IV/2008 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit	Mengganggu ketenteraman masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan	Menjaga ketenteraman masyarakat
87	Hasil monitoring adanya dugaan penyimpangan dan program bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	- UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Sampai selainya monitoring dan upaya tidak lanjut dalam penanganan terhadap penyimpangan yang terjadi	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik

88	Dokumen Hasil Pengawasan nirkawak (Waskat)	- Kepmenpan No. KEP/46/ M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Pengawasan, Melekat dan Pengawasan Pemerintahan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, j dan l	Atas ijin dan pihak yang menjadi subjek pengawasan	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
89	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk pemeriksaan reguler, khusus, hewah laporan keuangan, evaluasi / pemantauan	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas, kecuali atas ijin Dewan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkeperentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkeperentingan
90	Penilaian uji kompetensi pegawai	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h	Tidak terbatas	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan tugas	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
91	Data hasil check up perorangan PNS/Pejabat	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
92	Data hasil tes potensi/ kompetensi PNS/Pejabat	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h	Tidak terbatas	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
93	Identitas PNS yang melanggar tata disiplin	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan h	Sampai ada putusan atas hasil pemeriksaan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
94	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
95	Identitas PNS yang mengajukan izin pemecatan/ pensiunan	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan h	Sampai ada putusan atas hasil penanganan atau pemeriksaan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
96	Data rencana penempatan/ pemindehan PNS/CPNS	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan i	Sampai selesainya proses penempatan/ pemindehan dari yang bersangkutan	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
97	Nonolen hasil sidang Baperjaket	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan i	Tidak terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah

98	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperkat	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tak terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
99	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tak terbatas	Mengganggu perencanaan jabatan	Mengutamakan proses penyusunan kebijakan
100	Aspek SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU no. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun	Pertimbangan dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengutamakan kesinambungan dan kebijakan pemerintah
101	Soal Tes CPNS	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i	Tak terbatas	Dapat mengganggu proses rekrutmen PNS dan merusak kerahasiaan seleksi	Menjaga akuntabilitas seleksi
102	Dokumen pengangkatan, pemindahan guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tak terbatas	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijunjung dan intervensi oleh semua pihak
103	SK pengangkatan, pemindahan guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Sampai yang bersangkutan diungkit dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijunjung dan intervensi oleh semua pihak
104	DP3/Penilaian prestasi kerja PNS	- PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Tak terbatas	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan
105	Berkas - berkas dan proses penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	- PP No. 53 Tahun 2010 - Perka BKN No. 21 Tahun 2010, Romawi IX Angka 8 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, b, dan i	Tak terbatas	Dapat berpotensi mengganggu objektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga objektivitas putusan

105	Keputusan ijin/keterangan tentang pemecatan PNS	- PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Sampai keluarnya keputusan ijin	Berpotensi mencurinya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan sengketa	Menjaga obyektivitas putusan ijin
107	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a.kemudahan pangkat b.kemudahan gaji berkala c.mutasi d.pensiun e.administrasi kepegawaian	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
108	Biodata elektronik PNS lengkap	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITK - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Data yang bersifat pribadi bila dibarengi akan mengungkap pribadi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
109	Data kepegawaian perencanaan PNS lengkap	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
110	Aspek data perencanaan PNS	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
111	Daftar urusan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan
112	Daftar pejabat yang akan dilantik	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Sampai dengan pelaksanaan jabatan	Mengganggu proses penyalinan kebijakan karena ada pengungkapan yang tidak sah	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
113	Daftar nominasi (rangkap) Pejabat Struktural	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i	Tidak terbatas	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil
114	Instrumen tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i	Tidak terbatas	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
115	Identifikasi hasil uji kompetensi PNS	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian PNS - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi PNS yang bersangkutan

116	Data perencanaan tenaga honorer/wisata bukti perjanjian pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, i dan j	Tidak terbatas	Menjaga rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Melindungi rahasia pribadi seseorang dan menghindari penyalahgunaan pihak - pihak yang tidak berkepentingan
	KEUANGAN				
117	Dokumen laporan/laporan pertanggungjawaban keuangan (SP/L) berikut lampirannya	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kesripan. Pasal 44 ayat (1) dan (2) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu kelancaran pelaksanaan program pemerintah	Mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan
118	Database wajib pajak dan retribusi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j - UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 173	Tidak terbatas	Melanggar privasi wajib pajak/ retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/ retribusi
119	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	- Permenkpu tentang Pedoman Penyusunan APBD - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan
120	Edukasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rincian 2.2.1	Permenkpu tentang Pedoman Penyusunan APBD - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu kelancaran pelaksanaan program pemerintah	Mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan

BUPRE-GROBOGAN,


SRI SUMARNI